

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2012, Rajawali Press, Jakarta.
- Abdul, Halim, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Basah Sjachran, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Marbun, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- S. Pamudji. 1985, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- S.P Siagian, 1990, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Salendiho, John, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejito Irawan, 1955, *Terjemahan Undang-Undang Gangguan (Hinder ordonantie)*, Noordhoff, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Solekhan , Moch., 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Setara, Malang.
- Subana, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta

B. Jurnal

Azhar, Muhamad, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, *Jurnal Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Volume V, Edisi 9, April 2011.

Fadil Fathurrahman, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013.

Fuqoha, “Implikasi Regulasi Izin Gangguan (*hinder ordonantie*) Terhadap Kualitas Lingkungan bagi Masyarakat Sekitar Industri”, *Lex Jurnalica*, Volume 15, Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 101.

Kusdarini, Eny, “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor IV Volume 24 Oktober 2017, hlm.14

Mardhani, Yusuf, “Eksistensi Izin Gangguan Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Kegiatan Usaha”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume II, Nomor 2, Februari 2019.

Mashuri, 2014, “Partisipasi Masyarakat sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi.”, *Jurnal Kewirausahaan* Volume 13 Nomor 2

Michael Tomy, 2019, “Permasalahan Hukum Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 1, Februari 2019 – Juli 2019.

Sigalingging, Angelius Henry dan Warjio, “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 116.

C. Riset/Skripsi

Adhitama, Raihan, “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Emalia, Firda Ayu, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Gubeng”, Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2017.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian

Sahisnu Uttunga, “Tinjauan Mengenai Pemberian Ijin Pengusahaan Kepariwisata Terkait Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Bendungan Kabupaten Semarang”, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Sulistya, Agnes Wardani, “Implementasi Asas Partisipasi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Tinatar, Pacitan Jawa Timur”, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

D. Internet

Agus, Rustam, “Pencabutan Izin Gangguan Diyakini Bakal Tingkatkan Kemudahan Berusaha”, diakses dari <https://jakarta.bisnis.com/read/20190424/77/915062/pencabutan-izin-gangguan-diyakini-bakal-tingkatkan-kemudahan-berusaha> pada Jum’at, 24 Januari 2020 pukul 20.47 WIB.

Anonim, “Izin Gangguan (HO)”, <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/689>, diakses pada tanggal 2 Desember 2019

Anonim, “Bagaimana Cara Mengurus Izin HO, Masih Perlukah Pelaku Usaha Mengurusnya”, <https://goukm.id/cara-mengurus-izin-ho/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pada pukul 10.20 WIB.

Dody Handoko, “Mendagri Cabut Layanan Izin Gangguan” diakses dari [www.https://elshinta.com/news/123731/2017/10/13/mendagri-cabut-layanan-izin-gangguan](https://elshinta.com/news/123731/2017/10/13/mendagri-cabut-layanan-izin-gangguan), pada tanggal 2 Desember 2019

Faratody, Leo, “Jangan Mengabaikan Izin Gangguan HO Kalau Mau Bisnis Anda Lancar”, diakses dari <https://www.easybiz.id/jangan-mengabaikan-izin-gangguan-ho-kalau-mau-bisnis-anda-lancar/> pada Jumat, 24 Januari 2020 pukul 20.34 WIB.

Rusqiyati Eka Arifa, “DPRD Yogyakarta khawatir pelanggaran perizinan semakin marak”, diakses dari <https://jogja.antaranews.com/berita/352359/dprd-yogyakarta-khawatir-pelanggaran-perizinan-semakin-marak>, diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

United Nation Development Programmes Policy Document, *Government for Sustainable Human Development*, <http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf> diakses dari pada tanggal 3 Desember 2019.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonantie*) S.1926-226.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Permendagri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Permendagri Nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Permendagri 27/2009 (Pasal 3 dihapus, ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 ayat (2) huruf b juga mengalami perubahan)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.